

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA
MODAL PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH P
ENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KABUPATEN SIGI TAHUN 2016-2019**

Fadlan

Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Abdul Azis
Lamadjido Palu, Jl. DR.Suharso, Besusu Barat, Palu Timur. Kota
Palu Sulawesi Tengah Inodnesia
Email: Fadlan123@gmail.com

ABSTRAK

Anggaran Belanja terutama belanja modal dipandang penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan pemerintahan. Belanja modal belum menjadi dominan dibandingkan belanja yang lain sedangkan belanja modal merupakan belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi dibandingkan belanja lainnya. Porsi alokasi belanja modal dalam APBD sangat penting karena realisasi atas belanja modal akan memiliki multiplier effect untuk menggerakkan roda perekonomian daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal OPD Penghasil PAD Kabupaten Sigi. Jumlah sampel 32 data realisasi dari OPD Penghasil PAD. Hasil penelitian diuji secara statistik dengan Analisis Regresi Linear Sederhana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dengan nilai *sign* 0,278. Hal ini terjadi karena PAD yang didapatkan oleh masing-masing OPD masih tergolong rendah sedangkan realisasi belanja modal dari masing masing OPD lebih tinggi sehingga dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan belanja modal belum menggunakan dana yang berasal dari PAD. Ketidakmampuan PAD dalam mendanai belanja modal menyebabkan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The expenditure budget, especially capital expenditure, is considered important because it is related to the sustainability of government activities. Capital expenditure has not become dominant compared to other expenditures, while capital expenditure is expenditure that is closely related to efforts to improve the economy compared to other spending. The portion of the allocation of capital expenditure in the APBD is very important because the realization of capital expenditure will have a multiplier effect to move the wheels of the regional economy. The purpose of this study was to determine the effect of local revenue on the capital expenditure of OPD producing PAD in Sigi Regency. The number of samples is 32 data of realization of PAD producing OPD. The results of the study were statistically tested with Simple Linear Regression Analysis. The results of this study found that local revenue has no effect on capital expenditure with a sign value of 0.278. This happens because the PAD obtained by each OPD is still relatively low while the realization of capital expenditure from each OPD is higher so it can be seen that in financing capital expenditures, funds from PAD have not been used. PAD's inability to fund capital expenditures causes PAD to have no effect on capital expenditures.

Keyword : *Capital Expenditure, Original Local Government Revenue*

A. PENDAHULUAN

Belanja daerah secara nasional pada tahun 2018 mencapai Rp.1894,7 triliun. Belanja pegawai porsinya masih dominan yaitu mencapai 46,7% atau sebesar Rp.365,7 triliun. Belanja Modal mencapai Rp.203,9 triliun atau sebesar 20,0%. Belanja Barang mencapai Rp.340,1 triliun atau 31,3%. Belanja modal belum menjadi dominan dibandingkan belanja yang lain sedangkan belanja modal merupakan belanja yang terkait erat dengan upaya peningkatan ekonomi dibandingkan dengan belanja pegawai.¹ Belanja Modal memiliki *multipler effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, semakin besar porsi belanja modal dalam APBD maka pengaruhnya akan sangat besar terhadap

¹ Ahmad Yani. 2019. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

perekonomian suatu daerah. Sebaliknya semakin rendah porsi belanja modal dalam APBD maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomianpun juga semakin sedikit.²

Pengalokasian sumber-sumber pendapatan daerah sampai saat ini masih menjadi masalah dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan publik seperti belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi belanja modal masih menjadi masalah yang sangat mendasar pada belanja modal seperti untuk alokasi belanja modal masih dibawah 30% dari yang disyaratkan. Hal ini menjadi masalah yang lebih besar jika pemerintah daerah secara mandiri tidak mampu mendorong pertumbuhan perekonomian daerahnya.³ Provinsi Sulawesi tengah memiliki belanja modal yang terus mengalami penurunan yaitu pada tahun 2013 mencapai 21%. Pada 2014 menurun menjadi 20% dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu menjadi 16,5%. Hal ini menunjukkan bahwa baik ditingkat nasional maupun daerah khususnya daerah Provinsi Sulawesi Tengah belanja modal masih belum memenuhi syarat belanja yaitu 30%.⁴

Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan dan rasio transfer mencerminkan rasio kemandirian daerah. Semakin tinggi rasio PAD menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kemandirian daerahnya dan sebaliknya untuk rasio transfer. Sehingga antara rasio PAD dan transfer memiliki sifat yang berlawanan. Secara nasional, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan rasio PAD tertinggi sedangkan yang terendah

²Askam tuasikal. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, hal 148-152

³Bratakusuma, Sholikin. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

⁴ Cahyono, Budi. 2005. Analisis Potensi Sumber Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Grobogan. *Jurnal Riset Bisnis Indonesia*. Vol. 1 (2) Juli 2005. Semarang: Unissula.

adalah Provinsi Papua Barat. Provinsi Sulawesi Tengah sendiri berada pada urutan 23 dari 33 provinsi, Keterkaitan antara PAD dan belanja modal yaitu PAD merupakan sumber pembiayaan dari belanja modal. PAD berasal dari masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lain-lain sebagainya. Dengan adanya pendapatan ini maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan public yang baik untuk masyarakat karena iuran dari masyarakatlah yang menjadi sumber pendapatan daerah.⁵

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai Apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal OPD Penghasil PAD Kabupaten Sigi tahun 2016-2019?

C. METODE PENELITIAN

Tipe riset ini ialah riset kuantitatif yang bermaksud untuk menerangkan kejadian empiris yang dilampirkan data statistik, persyaratan dan pola korelasi antar faktor. Data yang dikaji dalam penyusunan ini ialah data sekunder yang berasal dari dokumen Laporan Realisasi APBD. Dari laporan Realisasi APBD ini didapatkan informasi mengenai banyaknya perwujudan Belanja Modal dan PAD didapatkan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Sigi dari tahun 2016-2019 .

D. PEMBAHASAN

Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Pekerjaan Umum memiliki target belanja modal yang menurun dengan target tertinggi pada tahun 2017 yaitu Rp.74.742.555.930 sedangkan terendah

⁵ Desi Oktarina. 2019. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Kec Ilir Timur Kota Palembang). Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang

pada tahun 2018 sebesar Rp.46.288.330.288. Berdasarkan nilai rata-rata OPD ini memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.42.084.873.206. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum belum optimal dalam menargetkan peningkatan kapasitas dan kualitas aset tetap.⁶

Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Kesehatan memiliki target belanja modal yang menurun dengan target tertinggi pada tahun 2017 yaitu Rp. 74.742.555.930 sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp. 46.288.330.288. Berdasarkan nilai rata-rata OPD ini memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.42.084.873.206. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan belum optimal dalam menargetkan peningkatan kapasitas dan kualitas aset tetap. Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Pariwisata memiliki target belanja modal yang meningkat dengan target tertinggi pada tahun 2019 yaitu Rp.2.789.615.300 sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp.852.970.507. Berdasarkan nilai rata-rata OPD ini memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.1.415.861.717. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata menargetkan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aset tetap.⁷

Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki target belanja modal yang menurun dengan target tertinggi pada tahun 2016 yaitu Rp.6.892.229.001 sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp.193.625.000. Berdasarkan nilai rata-rata OPD ini memiliki nilai rata-rata sebesar

⁶ Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.

⁷ Direktorat Jendral Keuangan daerah. 2017. Postur APBD, Jakarta

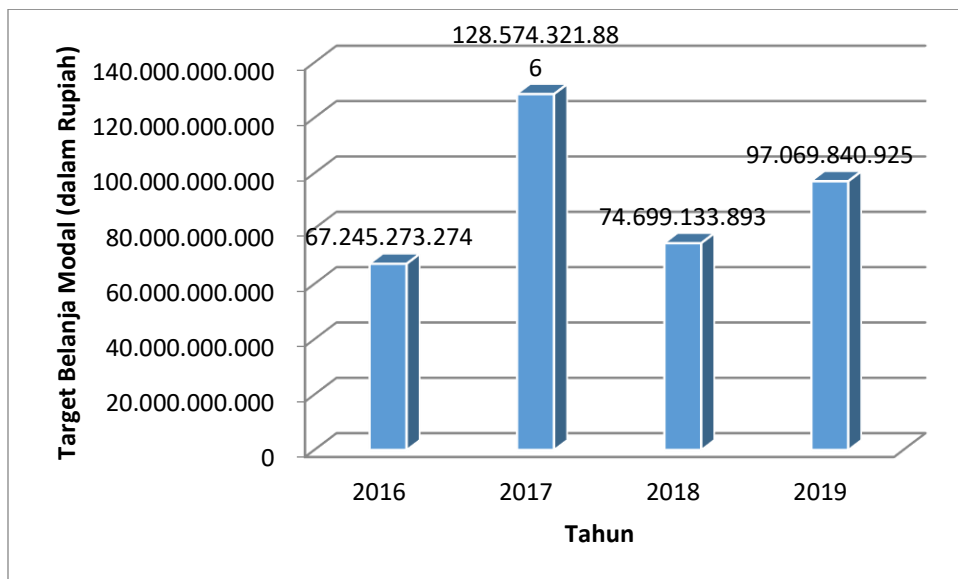
Rp.2.031.717.250. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum optimal dalam menargetkan peningkatan kapasitas dan kualitas aset tetap.

Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu hanya memiliki alokasi untuk belanja modal pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.188.828.000. Pada tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2019 OPD ini tidak memiliki belanja modal karena memfokuskan anggarannya untuk peningkatan PAD.

Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki target belanja modal yang meningkat dengan target tertinggi pada tahun 2019 yaitu Rp.2.883.539.500 sedangkan terendah pada tahun 2017 sebesar Rp.532.811.400. Berdasarkan nilai rata-rata OPD ini memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.1.507.957.276 Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika menargetkan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aset tetap.⁸ Berdasarkan dari data target belanja modal selama empat tahun terakhir menunjukkan bahwa untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki target belanja modal yang meningkat dengan target tertinggi pada tahun 2019 yaitu Rp.1.133.948.000 sedangkan terendah pada tahun 2018 sebesar Rp.26.492.000. Berdasarkan nilai rata-rata OPD ini memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.383.660.309. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menargetkan untuk melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas aset tetap.

⁸ Elni. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal(Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). e-Jurnal Katalogis, Volume 4Nomor 2, Februari 2016

Gambar 2
Grafik Target Belanja Modal OPD Penghasil PAD Tahun
2018-2019



Berdasarkan grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai target belanja modal selama empat tahun terakhir cenderung fluktuatif dengan nilai tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp.128.574.321.886 dan terendah pada tahun 2016 sebesar Rp.67.245.273.274.⁹

Analisis Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil uji distribusi data menggunakan Kolmogorov-smirnov test menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal dengan nilai signikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,001. Berdasarkan hasil uji distribusi data menggunakan Kolmogorov-smirnov test menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal dengan nilai signikansi di bawah 0,05 yaitu sebesar 0,001. Data yang berdistribusi tidak normal diperbaiki dengan

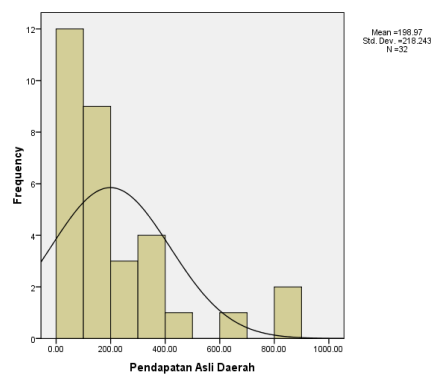
⁹ Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resources Allocation in The Public Sector and Their Implication for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper, 147.

menggunakan transformasi data yaitu salah satu cara menormalkan data dengan merubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain yang masih memiliki nilai sama sehingga data dapat memenuhi kriteria uji asumsi klasik. (Ghazali, 2016). Transformasi dilakukan dengan tahap –tahap berikut ini :¹⁰

- 1) Tahapan pertama adalah menentukan kecondongan dari data histogram. Terdapat beberapa tipe kecondongan data
- 2) Tahapan kedua adalah menentukan bentuk Transformasi sesuai dengan bentuk grafik pada tahap pertama

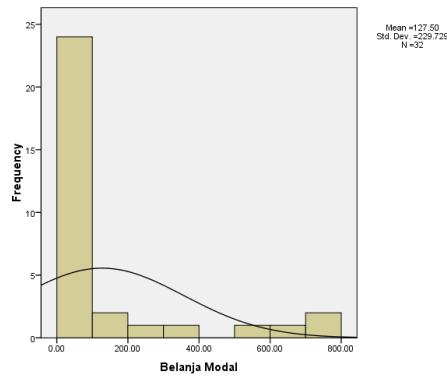
Berdasarkan identifikasi histogram regresi linear didapatkan hasil sebagai berikut :

Histogram Pendapatan Asli Daerah



Histogram Belanja Modal

¹⁰ Gujarati, Damodar. 200. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.



Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,278 maka secara parsial, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal sebagai berikut :

$$Y = 4.757 + 0,229X$$

Hasil dari persamaan regresi tersebut di atas memberikan pengertian bahwa :

- a. Nilai konstanta sebesar 4.757 yang berarti bahwa apabila variabel pendapatan asli daerah tetap atau konstan, maka belanja modal OPD Penghasil PAD sebesar 4.757%
- b. Koefisien regresi 0,229 yang berarti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Koefisien regresi sebesar 0,229 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1% maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 22,9% dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil nilai signifikansi yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempengaruhi belanja modal. Hal ini dapat diartikan Pendapatan Asli Daerah belum mampu untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap belanja modal karena Pendapatan Asli Daerah persentasenya masih sangat kecil sehingga tidak

dapat mempengaruhi belanja modal. PAD yang didapatkan oleh masing-masing OPD masih tergolong rendah sedangkan realisasi belanja modal dari masing masing OPD lebih tinggi sehingga dapat diketahui bahwa dalam pembiayaan belanja modal belum menggunakan dana yang berasal dari PAD. Ketidakmampuan PAD dalam mendanai belanja modal menyebabkan PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal.¹¹

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.¹² Dari hasil realisasi OPD penghasil PAD Kabupaten Sigi pengasilan yang berasal dari pajak daerah paling besar berasal dari Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi peningkatan pada panghasilan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sehingga menjadikannya sumber penghasilan yang berasal dari pajak tertinggi. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi daerah pada tahun 2016-2018 pendapatan terbesar berasal dari Pendapatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional sedangkan pada tahun 2019 pendapatan retribusi tertinggi berasal dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Dalam rangka kemandirian daerah, Pajak dan Retribusi Daerah menjadi sangat penting. Tanpa ada kemandirian posisi pemerintah dari sisi finansial menjadi lemah dan akan terus bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Kabupaten Sigi dilihat dari kemampuan merealisasikan target penerimaan pajak daerah secara rata-rata dari tahun 2016-2019 adalah sebesar 120%. Hal ini menunjukkan apabila dilihat dari pencapaian target setiap tahunnya menunjukkan masih luasnya potensi yang ada, sehingga

¹¹ Hartiningsih, Nina dan Edyanus Herman. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau. *Jurnal Teknik Manajemen Bisnis*

¹² Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. *Journal of International Business Management*. 3(3): pp:54-60.

target tersebut relatif mudah tercapai. Oleh karena itu harus dilakukan usaha-usaha untuk menggali potensi yang ada sehingga dapat ditentukan target yang lebih realistis dan menunjukkan potensi yang sebenarnya. Untuk menentukan target yang realistis maka harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak.¹³

Pencapaian target retribusi daerah cenderung fluktuatif namun nilai realisasi retribusi cenderung mengalami penurunan selama empat tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi kurang optimalnya pengelolaan retribusi daerah. Berdasarkan Desi Oktarina (2019) Pendapatan Asli Daerah yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal dikarenakan oleh beberapa kendala dari petugas seperti jumlah petugas yang belum memadai, masih terjadinya penggelapan dalam pemungutan retribusi, ketidaktahuan petugas dalam pemungutan retribusi tertentu sehingga membuat objek retribusi tidak terpungut dengan baik, tanggung jawab yang kurang sehingga mampu menyebabkan penyalahgunaan wewenang serta pelayanan yang kurang memadai sedangkan kendala dari masyarakat seperti keterbatasan informasi tentang retribusi dan peraturannya.¹⁴

¹³ Pradita, R. R. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.

¹⁴ Puspitarini, P. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Kabupaten Pacitan. Skripsi. Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal OPD penghasil PAD Kabupaten Sigi Tahun 2016-2019. Pengaruh antar variabel yang diteliti sesuai dengan hasil pembahasan yaitu Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal OPD penghasil PAD Kabupaten Sigi tahun 2016-2019.

F. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa saran yang bersifat membangun untuk sebagai bahan evaluasi maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Diantaranya :

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan pengetahuan terkait dengan belanja modal OPD penghasil PAD di suatu daerah, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal seperti pendapatan asli daerah.
2. Bagi OPD penghasil PAD di Kabupaten Sigi sebaiknya dapat meningkatkan pendapatannya sehingga dapat menunjang pengalokasian belanja modal untuk menunjang kegiatan yang produktif.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menguji variabel-variabel lain yang berhubungan dengan belanja modal. Selain itu peneliti selanjutnya mampu memperluas sampel dalam penelitian yang berhubungan dengan belanja modal seperti di kota atau kabupaten lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji Purnomo Bayu., I Ketut Kirya., Gede putu. 2015. Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Buleleng. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha.
- Ahmad Yani. 2019. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Askam tuasikal. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, hal 148-152
- Bratakusuma, Sholikin. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Cahyono, Budi. 2005. Analisis Potensi Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Grobogan. Jurnal Riset Bisnis Indonesia. Vol. 1 (2) Juli 2005. Semarang: Unissula.
- Desi Oktarina. 2019. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Kec Ilir Timur Kota Palembang). Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang
- Dewi, Adha. 2006. Kajian Penerapan Akuntansi Biaya pada Anggaran Belanja Daerah Kota Singkawang. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Direktorat Jendral Keuangan daerah. 2017. Postur APBD, Jakarta
- Elni. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah). e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 2, Februari 2016
- Fozzard, Adrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resources Allocation in The Public Sector and Their Implication for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper, 147.
- Gugus, Arbie, 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. E-Jurnal Universitas Negeri Semarang. Semarang

- Gujarati, Damodar. 2008. *Ekonometri Dasar*. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.
- Hustiarto sudarwadi. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat Tahun 2007-2014)*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Padang, 2015
- ImamGhozali. 2008. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Kementerian Keuangan RI. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Kementerian Keuangan RI : Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI. 2019. *Ringkasan Alokasi dan Realisasi APBN Tahun 2016-2019*. Kementerian Keuangan RI : Jakarta.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. 2014. *Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*. Jurnal EMBA. Vol 2. No.1: 646-655
- Nuarisa, Sheila Ardhian. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal 2 (1), 89-95
- Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Novi Pratiwi, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 2007)
- Olatunji, O.C., O.Asalu Taiwo and J.O Adewoye. 2009. *A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State*. Journal of International Business Management. 3(3): pp:54-60.